

ABSTRAKSI

Pada suatu organisasi yang terus tumbuh dan berkembang, pendelegasian wewenang merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan dalam upaya untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang semakin besar dan kompleks.

Dalam pelaksanaan proses pengendalian manajemen, diperlukan adanya suatu informasi akuntansi pertanggungjawaban yang akan membantu pimpinan badan usaha dalam penilaian prestasi kerja bawahannya. Meskipun dalam proses penilaian bukan hanya semata didasarkan dari catatan data akuntansi saja, namun akuntansi pertanggungjawaban mempunyai nilai lebih karena penanggung jawab atas biaya yang terjadi dapat diketahui sehingga akan memotivasi masing-masing pusat pertanggungjawaban untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan operasi usahanya.

Sebagai gambaran atas penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu badan usaha adalah dengan dilaporkannya pelaksanaan kegiatan masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada pimpinan di atasnya. Dalam laporan tersebut dipertanggungjawabkan semua elemen-elemen yang secara langsung berada dalam pengendalian seorang pimpinan.

Dari hasil analisis diketahui bahwa untuk melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban, suatu badan usaha perlu memperhatikan unsur-unsur pendukung yaitu adanya struktur organisasi yang mendelegasikan tugas dan wewenang secara tegas dan jelas, adanya sistem anggaran yang dibuat secara konsisten, digolongkannya biaya atas biaya terkendali dan tidak terkendali, dan adanya pengklasifikasian atas kode rekening.

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Rumah Sakit "X" telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yang diwujudkan dengan adanya suatu kewajiban bagi tiap-tiap unit untuk melaporkan hasil kegiatan operasional kepada pimpinan di atasnya. Namun disisi lain, terdapat beberapa hal yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban dari tiap-tiap unit tersebut masih belum cukup memadai untuk digunakan sebagai alat bantu dalam penilaian prestasi. Hal dimaksud tersebut adalah belum didelegasikannya tanggung jawab atas biaya, sistem anggaran global yang diterapkan, belum dipisahkannya biaya terkendali dan tidak terkendali, dan klasifikasi kode rekening yang belum menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas biaya.

Dengan tidak melakukan perubahan atas struktur organisasi yang ada, organisasi Rumah Sakit "X" dikelompokkan dalam beberapa pusat pertanggungjawaban dan dipisahkannya antara biaya terkendali dan tidak terkendali. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pada saat dilakukan pengklasifikasian atas kode rekening. Klasifikasi kode rekening Rumah Sakit

"X" setelah perubahan diatas, akan dapat menunjukkan pusat biaya mana yang harus bertanggung jawab atas biaya yang terjadi. Disamping hal tersebut, usulan dilibatkannya tiap-tiap unit penerima anggaran dalam menyusun anggaran unitnya juga dilakukan agar tujuan akuntansi pertanggungjawaban dapat mencapai sasarannya.

Informasi dalam laporan pertanggungjawaban tiap-tiap unit yang telah memuat klasifikasi kode rekening yang sesuai dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban, perbandingan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang diterima serta analisis atas selisih yang terjadi, dapat digunakan pimpinan Rumah Sakit "X" sebagai alat bantu yang lebih memadai dalam penilaian atas prestasi kerja unit-unit yang ada dibawahnya.

